

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Putri Oktaviani

NPP. 32.0865

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: putriok27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Irwan Tahir, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): *The increasingly complex waste problem due to population growth and urbanization requires effective and participatory management in Palu City. Purpose:* This study aims to analyze the influence of the accountability and transparency of the Environmental Agency on the level of community participation in waste management in Palu City. **Method:** This study uses a quantitative approach with Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM – PLS) analysis techniques to test the influence of independent variables on dependent variables. The data was collected through the distribution of questionnaires to the community in eight sub-districts in Palu City. **Results:** The results of the study show that the community tends to participate more actively when there is information disclosure and clear accountability from the government in waste management programs. These findings are expected to contribute to the Palu City Government in formulating more effective and sustainable waste management policies by involving the community as strategic partners. In addition, this research is also expected to be a reference for other regions in building participatory environmental governance systems. **Conclusion:** The accountability and transparency of the Environment Agency have a positive and significant effect on the level of community participation, both partially and simultaneously. **Keywords:** Accountability, Transparency, Community Participation, Waste Management, Palu City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan sampah yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menuntut adanya pengelolaan yang efektif dan partisipatif di Kota Palu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi Dinas Lingkungan Hidup terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM – PLS) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat di delapan kecamatan di Kota Palu. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi ketika terdapat keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak pemerintah dalam program pengelolaan sampah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Palu dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan

dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun sistem tata kelola lingkungan yang partisipatif. **Kesimpulan:** Akuntabilitas dan transparansi Dinas Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Kota Palu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan kota, terutama di Kota Palu, yang mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat, menciptakan tekanan besar pada sistem pengelolaan sampah yang ada (D. Maryani & Lambelanova, 2019; D. Maryani & Nainggolan, 2019; E. Maryani & Indrianty, 2024). Masalah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Hendra et al., 2024). Penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, yang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan masalah kesehatan (Chisholm et al., 2021; Zhang et al., 2022).

Kebersihan lingkungan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sampah (Kumari & Raghubanshi, 2023; Kurniawan et al., 2023; Saleh et al., 2023). Ketika pemerintah daerah tidak mampu mengelola sampah dengan baik, akan terjadi penumpukan limbah yang dapat menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak sehat (Hajam et al., 2023; Jain et al., 2023). Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Tchobanoglous et al. (1993), sampah mengacu pada segala bentuk limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia ataupun hewan dan secara umum sudah dibuang karena tidak berguna atau diperlukan lagi yang biasanya berbentuk padat. Maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan barang sisa atau buangan yang sering kali dianggap tidak mempunyai nilai guna, nilai jual, atau nilai ekonomi lagi. Namun, permasalahan sampah tidak dapat diabaikan, karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penanganan sampah menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang mendesak dan sering kali mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Di tengah tantangan yang terus meningkat terkait permasalahan sampah, Pemerintah Kota Palu telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya. Dalam upaya ini, mereka tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Salah satu langkah awal yang diambil adalah pemilahan sampah. Pemerintah mendorong masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas untuk melakukan pemisahan antara sampah organik dan non-organik. Untuk memastikan sampah yang telah dipilah dapat dikelola dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengelola pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan menggunakan 190 unit armada. Truk dan pick-up ini beroperasi di berbagai kelurahan, memastikan bahwa sampah diangkut secara teratur dan efisien.

Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pengangkutan. Pemerintah juga menerapkan sistem pengolahan yang inovatif melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R). Beberapa kelurahan telah berhasil mengimplementasikan sistem ini, serta pengolahan di pasar dan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kawatuna. Dengan cara ini, pemerintah berusaha mengurangi volume sampah yang harus dibuang dan meningkatkan nilai ekonomis dari sampah itu sendiri.

Pemerintah Kota Palu mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 untuk mendukung upaya ini. Peraturan ini membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam, sebagai langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif dari sampah plastik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Pemerintah Kota Palu juga menunjukkan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat melalui Visi Pemerintah Kota Palu yang menyatakan tujuan “Membangun Kota Palu yang mandiri, aman, dan nyaman, kuat, dan profesional dalam konteks berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan agama”. Salah satu dari Misi mereka adalah “Memperbaiki kondisi lingkungan yang aman dan nyaman dengan bantuan infrastruktur yang tahan terhadap bencana”. Dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2016.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Walaupun pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menangani permasalahan sampah ini, pada kenyataannya kompleksitas permasalahan sampah semakin meningkat akibat beragam faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih konsumtif, hal ini mengakibatkan peningkatan volume sampah secara signifikan yang dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.
Timbulan Sampah Kota Palu tahun 2021-2023

Tahun	Provinsi	Kab/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	Sulawesi Tengah	Kota Palu	186.93	72,298.84
2022	Sulawesi Tengah	Kota Palu	187.38	66,288.90
2023	Sulawesi Tengah	Kota Palu	267.00	97,492.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, tahun 2021-2023

Berbagai aktivitas masyarakat Kota Palu dari berbagai lokasi berkontribusi pada jumlah tumpukan sampah. Sumber-sumber utama sampah tersebar di beberapa titik strategis, meliputi area hunian, kawasan bisnis, serta lokasi fasilitas publik dan sosial dengan cerminan kegiatan spesifik yang berlangsung di dalamnya. Seiring dengan dinamika pertumbuhan populasi Kota Palu, terjadi peningkatan proporsional dalam jumlah sampah yang dihasilkan. Penanganan permasalahan sampah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama dari berbagai pihak, mengingat pengelolaan limbah yang efektif memerlukan keterlibatan semua komponen. Merujuk pada UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin sistem pengelolaan sampah berfokus pada pelestarian lingkungan, juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya mengatasi sampah dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan implementasi program pengelolaan sampah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan warga dalam upaya pengelolaan sampah. Sebaliknya, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi (Lasa & Lestari, 2019). Hubungan antara akuntabilitas dan transparansi pemerintah dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Palu belum banyak diteliti. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki peran penting sebagai landasan penelitian. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam setiap penelitian, baik dari fokus penelitian, metode penelitian, dan lain sebagainya, namun penelitian terdahulu dapat menjadi referensi ilmu untuk memperkaya teori dan memfasilitasi identifikasi prosedur logis untuk merakit penelitian teoretis dan konseptual. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” oleh Sukarman & Rohim (2022) menemukan bahwa semua variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) berpengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat), namun untuk variabel transparansi tidak begitu signifikan, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih menganggap pemerintah desa kurang transparan secara 100%. Penelitian yang berjudul “Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Kelurahan Tompobalang)” oleh Yahya et al. (2022) menemukan bahwa secara umum pengelolaan sampah di Kelurahan Tompobalang masih pada kategori kurang. Dimana, pengelolaan sampah berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang lemah terhadap penurunan kualitas lingkungan di Kelurahan Tompobalang. Dan apabila kinerja pengelolaan sampah meningkat maka kualitas lingkungan juga akan mengalami peningkatan. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma” oleh Oktavia (2020) menemukan bahwa variabel akuntabilitas dan variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Hal tersebut dibuktikan melalui uji F (simultan) yang nilai sig kurang dari α 0.05 yaitu sebesar 0.000 sehingga hipotesis H3 diterima. Penelitian yang berjudul “*Can digital transformation improve the transparency and accountability of Indonesian public governance?*” oleh Tahir et al. (2024) menemukan bahwa transformasi digital memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, transformasi digital memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap transparansi publik dan transparansi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat” oleh Pramudi & As’ari (2023) menemukan bahwa di Desa Karanglo, Kecamatan Godean, terdapat pengaruh positif antara pemberdayaan masyarakat dengan ketiga faktor yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat” oleh Kuswanti & Kurnia (2020) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok” oleh Dinda (2023) menemukan bahwa skor rata-rata dari nilai keseluruhan responden adalah 78,36 hal ini mengakibatkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok masuk dalam kategori tinggi. Adapun bentuk partisipasi yang masyarakat berikan dapat berupa partisipasi dalam buah pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk harta benda, partisipasi dalam bentuk kemahiran dan keterampilan dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang)” oleh Arifa et al. (2019) menemukan bahwa masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam program bank sampah Desa Nijang di Kabupaten Sumbawa dari hasil olahan data diperoleh sebesar 58 persen. Angka ini mengidentifikasi bahwa masyarakat sudah sadar akan dampak yang ditimbulkan dari adanya sampah bagi lingkungan, kesehatan dan pendapatan dari hasil menabung sampah. Penelitian berjudul “Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa” oleh Yanto & Aqfir (2020) menemukan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di tolak. Artinya adalah secara simultan dan parsial (sebagian) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli. Penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo” oleh Handayani & Agussalim (2023) menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong sedang, sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah. Jadi, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah belum menyeluruh. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dibangunnya bank sampah induk di Kelurahan Pulubala dan TPS 3R. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai dasar teoretis yang mendukung kerangka pemikiran penelitian serta mengidentifikasi celah studi yang masih jarang dibahas terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi Dinas Lingkungan Hidup terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang membuka peluang untuk menghadirkan unsur kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh akuntabilitas dan transparansi Dinas Lingkungan Hidup terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Sukarman & Rohim (2022), Oktavia (2020), Pramudi & As'ari (2023), dan Yanto & Aqfir (2020) dari segi lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Yahya et al. (2022), Tahir et al. (2024), Kuswanti & Kurnia (2020), Dinda (2023), Arifa et al. (2019) Handayani & Agussalim (2023) dari segi jumlah variabel, keberadaan variabel *intervening*, dan metode penelitian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi Dinas Lingkungan Hidup terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.

II. METODE

Penulis menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan statistik inferensial dalam melakukan pencarian data. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, atau peristiwa saat ini (Simangunsong, 2016). Metode deskriptif digunakan untuk membuat suatu gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fenomena yang ada. Penulis menggunakan konsep Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) dengan dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Untuk variabel transparansi, penulis menggunakan konsep Transparansi menurut Andrianto (2007) yang terdiri atas beberapa dimensi, yaitu ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Untuk variabel partisipasi masyarakat, penulis menggunakan konsep Partisipasi Masyarakat menurut Oakley (1991) yang terdiri atas dimensi manipulasi, konsultasi, membangun konsensus, pengambilan keputusan, pengambilan risiko, kemitraan, dan *self management*. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh rumah tangga yang mendiami kota palu sebanyak 87.016 rumah tangga. Sampel, menurut Arikunto (2018:131), adalah bagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik tertentu untuk mewakili karakteristik populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling* dimana teknik ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalaam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan teknik Slovin dan menggunakan taraf signifikansi atau nilai *error* sebesar 5%. Sampel responden dalam penelitian ini berjumlah 398 orang yang terdiri dari masyarakat Kota Palu yang ditentukan secara acak di berbagai tempat dan kalangan seperti di area perumahan, pasar, rumah sakit, sekolah maupun tempat publik lainnya yang mewakili keseluruhan populasi. Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan skala Likert. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, analisis *Partial Least Square – Structural Equation Modeling* (SEM – PLS). Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang disesuaikan dengan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2024/2025.

III. HASIL/PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif

3.1.1 Deskripsi Variabel Akuntabilitas (X1)

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tanggapan responden terhadap indikator-indikator variabel Akuntabilitas (X1). Variabel ini terdiri atas 12 indikator (X101–X112), yang diukur menggunakan skala Likert 1–5.

Tabel 1.
Jawaban Responden Terhadap Akuntabilitas (X1)

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
X101	1.000	0.000	4.464	5.000	3.000	5.000	0.728	-0.472	-0.970
X102	2.000	0.000	4.414	5.000	3.000	5.000	0.747	-0.730	-0.842
X103	3.000	0.000	4.444	5.000	3.000	5.000	0.753	-0.623	-0.937
X104	4.000	0.000	4.524	5.000	3.000	5.000	0.674	-0.055	-1.095
X105	5.000	0.000	4.494	5.000	3.000	5.000	0.700	-0.266	-1.032
X106	6.000	0.000	4.456	5.000	3.000	5.000	0.720	-0.494	-0.937
X107	7.000	0.000	4.436	5.000	3.000	5.000	0.736	-0.615	-0.895
X108	8.000	0.000	4.368	5.000	3.000	5.000	0.793	-1.002	-0.758
X109	9.000	0.000	4.398	5.000	3.000	5.000	0.778	-0.864	-0.828
X110	10.000	0.000	4.466	5.000	3.000	5.000	0.731	-0.467	-0.983
X111	11.000	0.000	4.386	5.000	3.000	5.000	0.770	-0.884	-0.787
X112	12.000	0.000	4.501	5.000	3.000	5.000	0.690	-0.210	-1.040

Sumber: Disusun Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator memiliki nilai rata-rata yang tinggi, yakni berkisar antara 4,368 hingga 4,524, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap pernyataan-pernyataan pada indikator akuntabilitas. Median dari seluruh indikator sebesar 5,000 mengindikasikan bahwa mayoritas responden memilih nilai tertinggi pada skala Likert, yaitu “Sangat Setuju”. Nilai standar deviasi berkisar antara 0,674 hingga 0,793, yang menandakan tingkat penyebaran data yang rendah dan menunjukkan konsistensi jawaban responden. Nilai minimum dan maksimum yang konsisten (3 hingga 5) juga memperkuat kesimpulan bahwa tidak terdapat outlier atau nilai ekstrem. Dari segi distribusi, nilai *skewness* seluruh indikator bernilai negatif, yang berarti distribusi data condong ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung memberikan nilai tinggi pada indikator akuntabilitas. Sementara itu, nilai *kurtosis* yang juga seluruhnya negatif menunjukkan bentuk distribusi platikurtik, yang artinya data lebih mendatar dibanding distribusi normal. Ini berarti bahwa persebaran data relatif merata dan tidak terkonsentrasi pada satu titik tertentu. Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap akuntabilitas dalam konteks penelitian ini tergolong sangat baik dan konsisten. Indikator-indikator akuntabilitas dipahami serta dihargai secara positif oleh masyarakat sebagai bagian penting dari keberhasilan suatu program atau kebijakan publik. Namun, aspek efisiensi anggaran masih menjadi perhatian yang dapat ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di masa mendatang.

3.1.2 Deskripsi Varabel Transparansi (X2)

Analisis deskriptif terhadap variabel Transparansi (X2) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi responden terhadap indikator-indikator transparansi dalam pengelolaan program yang diteliti. Variabel ini diukur menggunakan 14 indikator dengan skala Likert 1–5.

Tabel 2.
Jawaban Responden Terhadap Transparansi (X2)

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
X201	13.000	0.000	4.514	5.000	3.000	5.000	0.689	-0.131	-1.086
X202	14.000	0.000	4.506	5.000	3.000	5.000	0.700	-0.190	-1.077
X203	15.000	0.000	4.484	5.000	3.000	5.000	0.697	-0.319	-0.991
X204	16.000	0.000	4.514	5.000	3.000	5.000	0.660	-0.127	-1.023
X205	17.000	0.000	4.456	5.000	3.000	5.000	0.727	-0.507	-0.946
X206	18.000	0.000	4.476	5.000	3.000	5.000	0.700	-0.363	-0.971
X207	19.000	0.000	4.456	5.000	3.000	5.000	0.717	-0.488	-0.932
X208	20.000	0.000	4.434	5.000	3.000	5.000	0.739	-0.632	-0.891
X209	21.000	0.000	4.499	5.000	3.000	5.000	0.708	-0.246	-1.061
X210	22.000	0.000	4.491	5.000	3.000	5.000	0.715	-0.301	-1.045

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
X211	23.000	0.000	4.501	5.000	3.000	5.000	0.690	-0.210	-1.040
X212	24.000	0.000	4.464	5.000	3.000	5.000	0.731	-0.479	-0.975
X213	25.000	0.000	4.494	5.000	3.000	5.000	0.704	-0.271	-1.038
X214	26.000	0.000	4.536	5.000	3.000	5.000	0.663	0.035	-1.119

Sumber: Disusun Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) untuk seluruh indikator variabel Transparansi berada dalam rentang 4,434 hingga 4,536, yang menunjukkan bahwa responden cenderung menyatakan setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan transparansi. Median seluruh indikator adalah 5,000, yang menegaskan bahwa sebagian besar responden memilih jawaban tertinggi dalam skala Likert, yaitu “Sangat Setuju”. Standar deviasi berkisar antara 0,660 hingga 0,739, yang menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah dan terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Rentang nilai minimum dan maksimum tetap berada pada skala 3 hingga 5, yang berarti tidak terdapat data ekstrem (*outlier*) dalam jawaban responden. Secara umum, nilai *skewness* (kemencengan distribusi) seluruh indikator bernilai negatif, yang menandakan bahwa data cenderung condong ke kanan, atau mayoritas responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap indikator transparansi. Nilai *kurtosis* yang juga sebagian besar bernilai negatif menunjukkan bahwa distribusi data bersifat platikurtik, yaitu lebih datar daripada distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung tersebar merata dan tidak terlalu terpusat pada satu nilai tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap transparansi dalam pengelolaan program berada pada tingkat yang sangat baik. Seluruh indikator transparansi mendapat tanggapan positif dan relatif konsisten antar responden. Namun, peningkatan dalam hal dokumentasi anggaran yang lebih jelas dan informatif masih dapat dilakukan untuk semakin memperkuat prinsip transparansi dalam pengelolaan sampah.

3.1.3 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

Variabel Partisipasi Masyarakat (Y) diukur menggunakan 21 indikator yang mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam program yang sedang diteliti. Penilaian dilakukan melalui skala Likert 1–5, dan analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memahami persepsi responden terhadap masing-masing indikator.

Tabel 3.

Jawaban Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
Y101	27.000	0.000	4.416	5.000	3.000	5.000	0.737	-0.697	-0.838
Y102	28.000	0.000	4.414	5.000	3.000	5.000	0.777	-0.805	-0.869
Y103	29.000	0.000	4.484	5.000	3.000	5.000	0.682	-0.306	-0.964
Y104	30.000	0.000	4.426	5.000	3.000	5.000	0.752	-0.693	-0.883
Y105	31.000	0.000	4.411	5.000	3.000	5.000	0.770	-0.797	-0.856
Y106	32.000	0.000	4.373	5.000	3.000	5.000	0.803	-1.015	-0.777
Y107	33.000	0.000	4.398	5.000	3.000	5.000	0.765	-0.829	-0.817
Y108	34.000	0.000	4.401	5.000	3.000	5.000	0.739	-0.754	-0.797
Y109	35.000	0.000	4.396	5.000	3.000	5.000	0.771	-0.854	-0.816
Y110	36.000	0.000	4.376	5.000	3.000	5.000	0.778	-0.938	-0.767
Y111	37.000	0.000	4.441	5.000	3.000	5.000	0.740	-0.602	-0.915
Y112	38.000	0.000	4.436	5.000	3.000	5.000	0.736	-0.615	-0.895
Y113	39.000	0.000	4.481	5.000	3.000	5.000	0.707	-0.346	-1.000
Y114	40.000	0.000	4.461	5.000	3.000	5.000	0.717	-0.464	-0.948
Y115	41.000	0.000	4.499	5.000	3.000	5.000	0.697	-0.233	-1.044
Y116	42.000	0.000	4.489	5.000	3.000	5.000	0.675	-0.276	-0.966
Y117	43.000	0.000	4.466	5.000	3.000	5.000	0.703	-0.418	-0.943
Y118	44.000	0.000	4.449	5.000	3.000	5.000	0.716	-0.521	-0.907
Y119	45.000	0.000	4.491	5.000	3.000	5.000	0.675	-0.261	-0.975

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
Y120	46.000	0.000	4.446	5.000	3.000	5.000	0.737	-0.573	-0.927
Y121	47.000	0.000	4.494	5.000	3.000	5.000	0.697	-0.262	-1.026

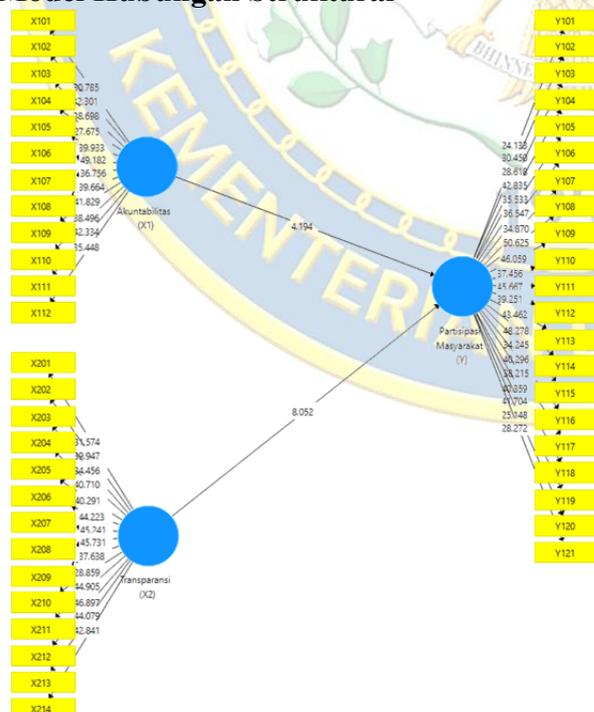
Sumber: Disusun Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh indikator berada dalam kisaran 4,373 hingga 4,499. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki persepsi yang sangat baik terhadap partisipasi mereka dalam program yang dimaksud. Nilai median seluruh indikator adalah 5,000, menandakan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban “Sangat Setuju”. Nilai standar deviasi berkisar antara 0,675 hingga 0,803, yang menunjukkan bahwa sebaran jawaban responden relatif kecil dan cukup homogen. Tidak terdapat nilai ekstrem, karena rentang nilai minimum dan maksimum tetap dalam skala 3 hingga 5. Nilai *skewness* seluruhnya bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung ke arah kanan (positif), artinya mayoritas responden memberikan skor tinggi. Sementara itu, nilai *kurtosis* sebagian besar juga bernilai negatif, yang menandakan distribusi platikurtik atau lebih datar dari distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program yang sedang berjalan berada pada kategori sangat baik, dengan persepsi yang konsisten dan positif dari para responden terhadap seluruh indikator partisipasi. Namun, aspek pengakuan dan pertimbangan terhadap masukan masyarakat dalam forum konsultasi masih dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa keterlibatan publik benar-benar berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan sampah.

3.2 Pengujian Hipotesis

Setelah melalui tahap pengujian outer model dan inner model, diperoleh model hubungan konstruk sebagai berikut.

Gambar 1.
Model Hubungan Struktural



Sumber: Disusun oleh Penulis (2025)

Pada gambar di atas, tampak bahwa konstruk Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) memiliki jalur pengaruh menuju konstruk Partisipasi Masyarakat (Y). Angka-angka yang terlihat pada jalur tersebut merupakan nilai *t-statistic* yang diperoleh dari hasil pengujian bootstrapping. Nilai-nilai ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antar konstruk signifikan secara statistik atau tidak. Secara umum, model struktural ini digunakan untuk menguji kekuatan dan arah hubungan kausal antara konstruk, serta untuk melihat kontribusi relatif masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan dua metode. Pengujian secara parsial menggunakan model yang dianalisis dengan SmartPLS 3.0 melalui teknik *bootstrapping*, sementara pengujian secara simultan dilakukan dengan aplikasi SPSS 27. Dari analisis ini, diperoleh nilai *t*-hitung untuk menilai pengaruh parsial dan *f*-hitung untuk mengukur pengaruh simultan. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% (0,05), dengan acuan *t*-tabel sebesar 1,96 dan *f*-tabel sebesar 3,02. Hipotesis diterima jika *t*-hitung melebihi *t*-tabel atau *f*-hitung lebih besar dari *f*-tabel.

Tabel 4.
Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	T _{hitung}	F _{hitung}	p-values	Hasil
H ₁	Terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup terhadap tingkat partisipasi masyarakat	4,450	-	0,000	Diterima
H ₂	Terdapat pengaruh positif antara transparansi Dinas Lingkungan Hidup terhadap tingkat partisipasi masyarakat	8,463	-	0,000	Diterima
H ₃	Terdapat pengaruh simultan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat partisipasi masyarakat	-	986,944	0,000	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah (2025)

3.2.1 Uji Hipotesis 1 (H1)

Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t*-hitung sebesar 4,450, yang lebih besar dari *t*-tabel sebesar 1,96, serta *p-value* sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis diterima, yang berarti semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan, semakin meningkat pula tingkat partisipasi masyarakat.

3.2.2 Uji Hipotesis 2 (H2)

Transparansi Dinas Lingkungan Hidup juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Nilai *t*-hitung yang diperoleh sebesar 8,463, lebih besar dari *t*-tabel sebesar 1,96, dengan *p-value* sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin transparan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaannya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang dihasilkan. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima.

3.2.3 Uji Hipotesis 3 (H3)

Pengujian secara simultan menggunakan analisis dengan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai *F*-hitung

sebesar 986,944, yang jauh lebih besar dari F-tabel sebesar 3,02, serta *p-value* sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis diterima, yang berarti bahwa kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berada dalam kategori sangat baik. Demikian pula dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu yang juga berada dalam kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas yang optimal dapat berjalan seiring dengan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nilai *t*-hitung sebesar 4,450 yang lebih besar dari *t*-tabel sebesar 1,96 serta *p-value* sebesar 0,000 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) menegaskan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan, semakin meningkat pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Hubungan positif antara akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, dengan adanya akuntabilitas yang baik, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Kedua, akuntabilitas menciptakan sistem yang lebih terbuka, di mana masyarakat merasa bahwa aspirasi dan masukan mereka dihargai serta diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, akuntabilitas juga mencerminkan adanya keadilan dan profesionalisme dalam pengelolaan program pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan kolektif seperti pengelolaan sampah.

3.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berada dalam kategori sangat baik. Demikian pula, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu juga berada dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan lingkungan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi.

Selanjutnya, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa transparansi Dinas Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu. Nilai *t*-hitung sebesar 8,463 lebih besar dari *t*-tabel sebesar 1,96, serta *p-value* sebesar 0,000 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin transparan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaannya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang dihasilkan. Hubungan positif antara transparansi dan partisipasi masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, transparansi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah, sehingga mereka lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, transparansi menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah menjalankan tugasnya secara jujur dan terbuka, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ketiga, transparansi

meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif. Ketika informasi mengenai program lingkungan terbuka untuk umum, masyarakat cenderung merasa memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

3.3.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi Dinas Lingkungan Hidup secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai F-hitung sebesar 986,944 yang jauh lebih besar dari F-tabel sebesar 3,02, serta *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Pertama, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang mereka ambil, sehingga masyarakat merasa lebih percaya untuk ikut serta dalam kegiatan publik. Kedua, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan dan program pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap isu-isu lingkungan. Ketika kedua faktor ini diterapkan secara bersamaan, masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan terdorong untuk lebih aktif dalam partisipasi kolektif, seperti pengelolaan sampah.

Selain itu, transparansi yang tinggi dapat memperkuat efektivitas akuntabilitas. Ketika informasi mengenai kebijakan lingkungan tersedia secara terbuka, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, akuntabilitas yang baik juga memastikan bahwa transparansi bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik pengelolaan lingkungan. Dengan adanya sinergi antara kedua faktor ini, masyarakat lebih termotivasi untuk terlibat dalam pengelolaan sampah karena mereka merasa memiliki kontrol dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Transparansi Dinas Lingkungan Hidup juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Pengujian secara simultan menggunakan analisis dengan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan positif antara akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sukarman & Rohim (2022) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin akuntabel suatu program, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Susisanti (2022) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada SMA Negeri 26 Bone memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Hasil ini mempertegas bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam suatu lembaga, semakin besar pula keterlibatan masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan

lingkungan juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian Aprilla et al. (2024) menekankan bahwa partisipasi publik memiliki potensi besar dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Temuan ini menggarisbawahi bahwa hubungan antara akuntabilitas dan partisipasi bersifat timbal balik, di mana keterlibatan masyarakat juga mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas desa. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh akuntabilitas, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem akuntabilitas itu sendiri.

Temuan penelitian menunjukkan hubungan positif antara transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian Sukarman & Rohim (2022) menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung pembangunan. Selain itu, penelitian Lasa & Lestari (2019) juga menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulungrejo. Ketika masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana dana desa digunakan, mereka akan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam pengawasan dan pelaksanaan program desa. Hasil penelitian Susisanti (2022) juga memperkuat temuan ini, di mana penerapan transparansi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan partisipasi masyarakat pada SMA Negeri 26 Bone. Transparansi dalam pengelolaan pendidikan terbukti mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang juga menemukan hubungan positif antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian Sukarman & Rohim (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi kedua faktor ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah mereka.

Selain itu, penelitian Lasa & Lestari (2019) juga menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulungrejo. Dengan adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang baik dari pihak pemerintah desa, masyarakat menjadi lebih terdorong untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

IV. KESIMPULAN

Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu, di mana semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Transparansi Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palu, di mana keterbukaan informasi meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk turut serta dalam upaya pengelolaan lingkungan. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang kuat terhadap partisipasi masyarakat. Kombinasi kedua faktor ini meningkatkan kepercayaan publik, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan lingkungan, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini berfokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian ini terbatas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini adalah langkah awal yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa depan. Penulis menyarankan agar harus lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan program lingkungan kepada masyarakat, baik melalui media sosial, website resmi, maupun sosialisasi langsung. Penelitian lanjutan terkait akuntabilitas dan transparansi di Dinas Lingkungan Hidup perlu dilakukan guna memperoleh hasil analisis yang akurat guna memperoleh rekomendasi kebijakan yang tepat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di masa yang akan datang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam pelaksanaan penelitian ini. Berkat kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan temuan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah di Kota Palu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Good E-government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Bayumedia.
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/EKSEKUSI.V2I4.1553>
- Arifa, F., Cita, F. P., & Iman, A. H. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang). *Nusantara Journal of Economics*, 1(01), 14–27. <https://doi.org/10.37673/NJE.V1I01.321>
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Chisholm, J. M., Zamani, R., Negm, A. M., Said, N., Abdel daiem, M. M., Dibaj, M., & Akrami, M. (2021). Sustainable waste management of medical waste in African developing countries: A narrative review. *Waste Management and Research*, 39(9), 1149–1163. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0734242X211029175>
- Dinda, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67549>
- Hajam, Y. A., Kumar, R., & Kumar, A. (2023). Environmental waste management strategies and vermi transformation for sustainable development. *Environmental Challenges*, 13, 100747. <https://doi.org/10.1016/J.ENVC.2023.100747>
- Handayani, D. N., & Agussalim, A. (2023). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo. *KOMUNITAS*, 14(1), 60–70. <https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V14I1.6145>

- Hendra, A., Setiawan, I., & Handayani, N. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Studi Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur* (1st ed.). Rtujuh Media Printing.
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47030/ADMINISTRASITA.V13I1.341>
- Jain, M., Kumar, D., Chaudhary, J., Kumar, S., Sharma, S., & Singh Verma, A. (2023). Review on E-waste management and its impact on the environment and society. *Waste Management Bulletin*, 1(3), 34–44. <https://doi.org/10.1016/J.WMB.2023.06.004>
- Kumari, T., & Raghubanshi, A. S. (2023). Waste management practices in the developing nations: challenges and opportunities. *Waste Management and Resource Recycling in the Developing World*, 773–797. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90463-6.00017-8>
- Kurniawan, T. A., Meidiana, C., Dzarfan Othman, M. H., Goh, H. H., & Chew, K. W. (2023). Strengthening waste recycling industry in Malang (Indonesia): Lessons from waste management in the era of Industry 4.0. *Journal of Cleaner Production*, 382, 135296. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.135296>
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2791>
- Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.33366/JISIP.V7I1.1447>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Penerbit Andi.
- Maryani, D., & Lambelanova, R. (2019). Government role in influencing creative economy for community purchasing power. *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 17(2), 835–843. <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.V17I2.9711>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Maryani, E., & Indrianty, S. (2024). The role of government and community in the development of local wisdom-based sustainable tourism village. *IOP Conference Series: Earth and* <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1366/1/012009>
- Oakley, P. (1991). *Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development*. International Labour Office.
- Oktavia, N. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6023/1/SKRIPSI%20NORNI.pdf>
- Pramudi, A. I., & As'ari, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 484–491. <https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V6I2.7945>

- Saleh, A., Mujahiddin, M., & Hardiyanto, S. (2023). Social construction in plastic waste management for community empowerment and regional structure. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1082–1090. <https://doi.org/10.29210/020232133>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.37849/MICI.V4I1.281>
- Susisanti, S. (2022). Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas dengan Partisipasi Komunitas SMA Negeri 26 Bone. *Manajemen Pendidikan*, 17(1), 22–35. <https://doi.org/10.23917/JMP.V17I1.15407>
- Tahir, M. I., Martini, A., Gunawan, A. A. N., Makbul, Y., Yossa, N., Wiryanto, W., Fahrudin, M., & Ilyas, R. (2024). Can digital transformation improve the transparency and accountability of Indonesian public governance? *International Journal of Data and Network Science*, 9. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.7.009>
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. (1993). *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill Companies.
- Yahya, M. A., Muhibuddin, A., & Syafri, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Urban and Regional Studies Journal*, 4(2), 116–122. <https://doi.org/10.35965/URSJ.V4I2.1468>
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal*, 2(2). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2122993&val=16312&title=Pengaruh%20Transparansi%20Partisipasi%20Dan%20Akuntabilitas%20Terhadap%20Kinerja%20Pengelolaan%20Alokasi%20Dana%20Desa%20Dan%20Dana%20Desa>
- Zhang, C., Hu, M., Di Maio, F., Sprecher, B., Yang, X., & Tukker, A. (2022). An overview of the waste hierarchy framework for analyzing the circularity in construction and demolition waste management in Europe. *Science of The Total Environment*, 803, 149892. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2021.149892>